

IV. GAMBARAN UMUM

A. Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian Partai Demokrat. Pada pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni Vence Rumangkang, Ahmad Mubarak, A. Yani Wachid (Alm), Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, Heroe Syswanto, RF. Saragih, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas dan T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi menjadi 99 orang. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang. Kepengurusan pun disusun dan disepakati bahwa kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 10 September 2001.

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatogana, Rusli Ramli dan RF. Saragih, diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Berlandaskan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat

sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

2. Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

3. Misi Partai Demokrat

- a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri dan pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah

melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

- c. Memperjuangkan tegarknya persamaan hak dan kewajiban warga Negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

4. Tujuan dan Fungsi Partai Demokrat

Partai Demokrat bertujuan:

- a. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme dan pluralisme.
- d. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta dinamis menuju

terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

Partai Demokrat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan hokum.
- c. Penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi politik rakyat.
- d. Penegakan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis, partisipasif dan beradab.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

5. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai

Keanggotaan:

- a. Anggota partai Demokrat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan menjadi anggota.
- b. Anggota Partai Demokrat terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan dan simpatisan. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang berjasa dalam perjuangan Partai dan ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Pusat. Simpatisan adalah setiap orang yang mendukung perjuangan Partai dan tidak menjadi anggota.

- c. Keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga.

Sistem Kaderisasi:

Kader Partai terdiri dari:

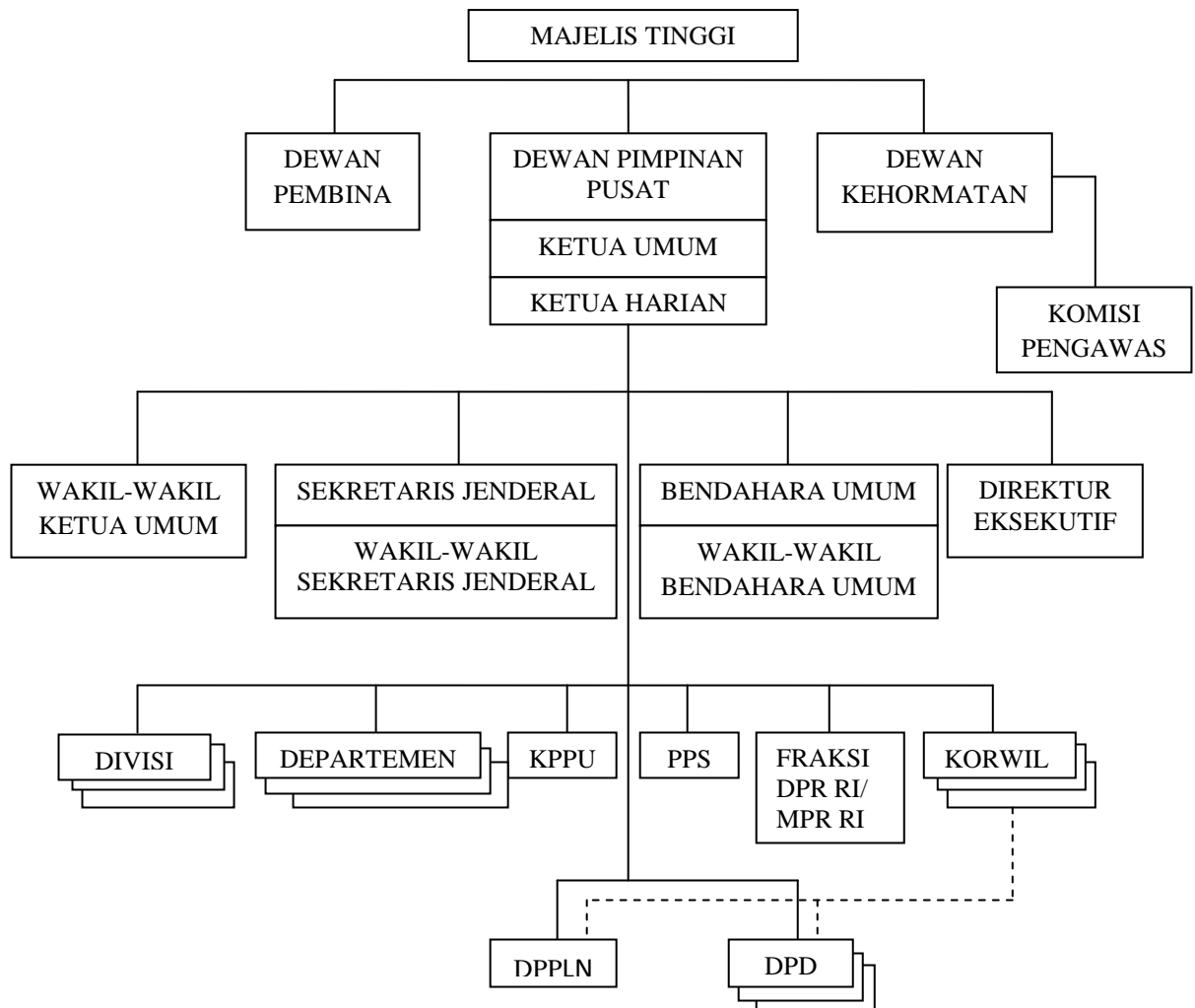
- a. Calon kader adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
- b. Kader Muda adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan pimpinan Anak Cabang.
- c. Kader Madya adalah anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Kader Utama, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.

6. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

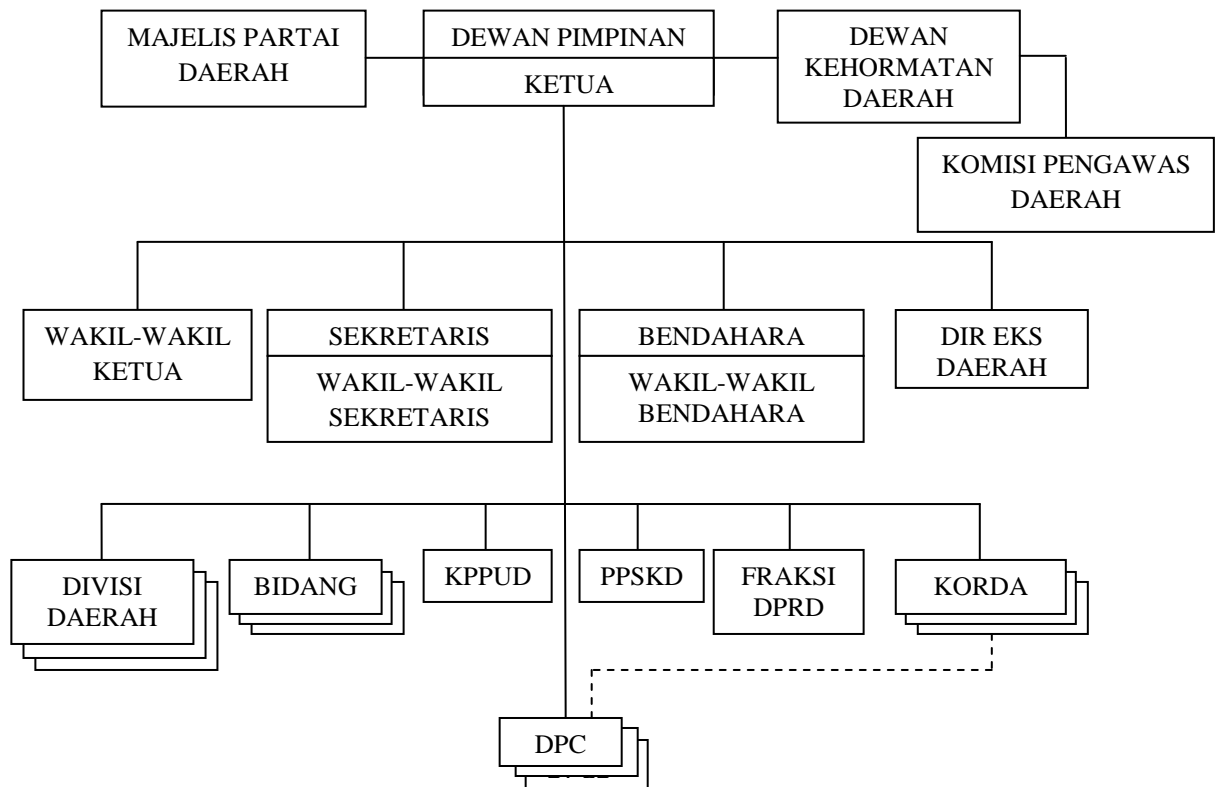
- a. Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur organisasi partai di daerah sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah serta memimpin semua kegiatan partai di daerah.
- b. Dewan Pimpinan Daerah mewakili partai dalam bertindak kedalam dan keluar di tingkat daerah.
- c. Dewan Pimpinan Daerah berwenang:

1. Menetapkan kebijakan tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, serta peraturan partai lainnya.
2. Mengusulkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pimpinan Fraksi kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Menetapkan Pimpinan Komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menetapkan Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Mengusulkan calon Bupati, calon wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Majelis Partai Daerah.
5. Mengusulkan partai Anggota Koalisi di tingkat Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat.
6. Menetapkan calon-calon Anggota Legislatif Daerah dengan memperhatikan saran dan pendapat Majelis Partai Daerah.
7. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang.

7. Struktur Organisasi Partai Demokrat



Gambar II. Struktur Organisasi Tingkat Pusat



Gambar III. Struktur Organisasi Tingkat Daerah

B. Lampung Post

Berdirinya Surat Kabar Harian Lampung Post berawal dari himbauan Menteri Penerangan (Menpen) Mashuri di Tahun 1974. Pada waktu itu di Indonesia sudah banyak surat kabar pemegang surat izin terbit (SIT), namun sebagian besar terbit tidak teratur, termasuk di daerah Lampung sendiri. Kesepakatan untuk membentuk Surat Kabar Harian di Lampung muncul setelah diadakan pertemuan antara Sofyan Akhmad pemilik surat kabar mingguan Pusbian, Ahmad Fuad pemilik surat kabar mingguan Independen dan Azis Kasyim wakil pemilik surat kabar mingguan Pos Ekonomi. Ketiganya sepakat untuk melakukan suatu penggabungan atau *marger* menjadi satu surat kabar yang terbit setiap hari.

Sebelum mengajukan SIT (Surat Izin Terbit) sebagai Surat Kabar Harian, SIT Pos Ekonomi dicabut Menpen, sehingga *marger* hanya dilakukan oleh SKM Pusbian dan SKM Independen. Hasil dari *marger* dua SKM tersebut adalah berdirinya yayasan yang bernama Yayasan Masa Kini. Setelah *marger* dilakukan, selanjutnya diurus surat permohonan rekomendasi ke PWI cabang Lampung, Juru Penerangan (Jupen) Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung. Setelah itu baru dilakukan pengajuan SIT kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia. Kurang lebih enam bulan kemudian keluar keputusan Menteri Penerangan tentang SIT SKH Lampung Post dengan nomor 04184/SK/Dirjen-p6/SIT/1974 tanggal 17 Juli 1974.

Pada awal pendirian, Lampung Post beralamat di Jalan S. Parman No. 6 Tanjung Karang. Edisi perdana SKH Lampung Post terbit pada tanggal 10

Agustus 1974, berukuran tabloid dengan 4 halaman, dengan oplah 3000-4000 eksemplar. Dari tahun 1974-1976 SKH Lampung Post hanya terbit sebanyak satu kali dalam seminggu. Sekitar tahun 1977 sampai dengan tahun 1981 SKH Lampung Post terbit tiga kali seminggu.

Tahun 1981 merupakan awal baru bagi Lampung Post, karena sarana dan prasarana sudah mendukung. Surat Kabar Lampung Post mulai terbit sebanyak enam kali dalam seminggu, dengan isi 6 halaman. Pada tahun 1982-1985 oplah Lampung Post cukup tinggi mencapai 30.000 eksemplar yang terus beranjak naik hingga saat ini.

Untuk memenuhi peraturan menteri penerangan RI no. 01/Per/Menpen/1984 Tentang Surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) tanggal 31 Oktober 1984 dan Surat Keputusan (SK) Menpem No.214/Kep/Menpem/1984 tentang prosedur dan persyaratan umum mendapatkan SIUPP, maka pada tanggal 30 November 1984 dilakukan perubahan bentuk organisasi yang semula berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Masa Kini Tanjung Karang, menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Masa Kini Mandiri. Pada tahun 1989, terbentuk kesepakatan kerjasama antara Surat Kabar Harian Lampung Post dengan PT. Surya Persinda Group Jakarta, yang masing-masing diwakili oleh Solfian Akhmad dan Surya Paloh. Dengan waktu yang relative singkat, kerjasama ini membawa perubahan terutama dalam hal pemberitaan dan manajemen organisasi Surat Kabar Harian Lampung Post. Penerbitan SKH Lampung Post menjadi 7 kali dalam seminggu, dimulai pada tahun 1995 dan hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini.

1. Visi Lampung Post

Menjadi surat kabar terdepan yang jujur, jernih, bermutu dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung.

2. Misi Lampung Post

Memberikan informasi yang bermutu mengiringi masyarakat Lampung menghadapi kemajuan sebagai Bacaan Masyarakat Terdidik. Meningkatkan kualitas produk yang menunjang perkembangan pasar. Membangun suasana kerja yang harmonis dan bersama membangun perusahaan yang sehat serta menguntungkan.

3. Profil Perusahaan

Nama perusahaan : Lampung Post

Alamat perusahaan : Jl. Soekarno-Hatta No. 108 Rajabasa, B. Lampung

Jenis perusahaan : Penerbitan dan Surat Kabar

Tahun didirikan : Tahun 1974

Bentuk perusahaan : Media cetak

Penerbit : PT. Masa Kini Mandiri

Bahasa : Indonesia

Isi berita : - Lokal : 50%

- Nasional : 30%

- Internasional : 20%

Jumlah halaman : 24 Halaman

Email : redaksi@lampungpost.co.id

4. Produk-Produk Surat Kabar Harian Lampung Post

Surat Kabar Harian Lampung Post mengelola penerbitan media informasi dalam bentuk sebagai berikut:

a. Media Cetak Harian

Penerbitan media cetak harian Lampung Post diselenggarakan setiap hari kecuali hari-hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Media *On-Line*

Media *On-Line* Harian Lampung Post yaitu www.lampungpost.com yang di *update* setiap hari.

5. Struktur Organisasi

Surat Kabar Harian Lampung Post dipimpin oleh seorang Pemimpin Umum dibantu oleh sekretaris secara struktural. Pemimpin Umum membawahi langsung Pemimpin Redaksi, Pemimpin Perusahaan dan Kepala Perwakilan/Kepala Biro yang terdapat di daerah-daerah. Di bawah Pemimpin Redaksi terdapat Redaktur Pelaksana yang membawahi Langsung Redaktur Penanggungjawab berita nasional, olahraga, politik dan lain-lain. Pemimpin Perusahaan dibantu oleh Asisten Pemimpin Perusahaan Operasional yang menangani bagian operasional dan Asisten Pemimpin Perusahaan *Marketing*.

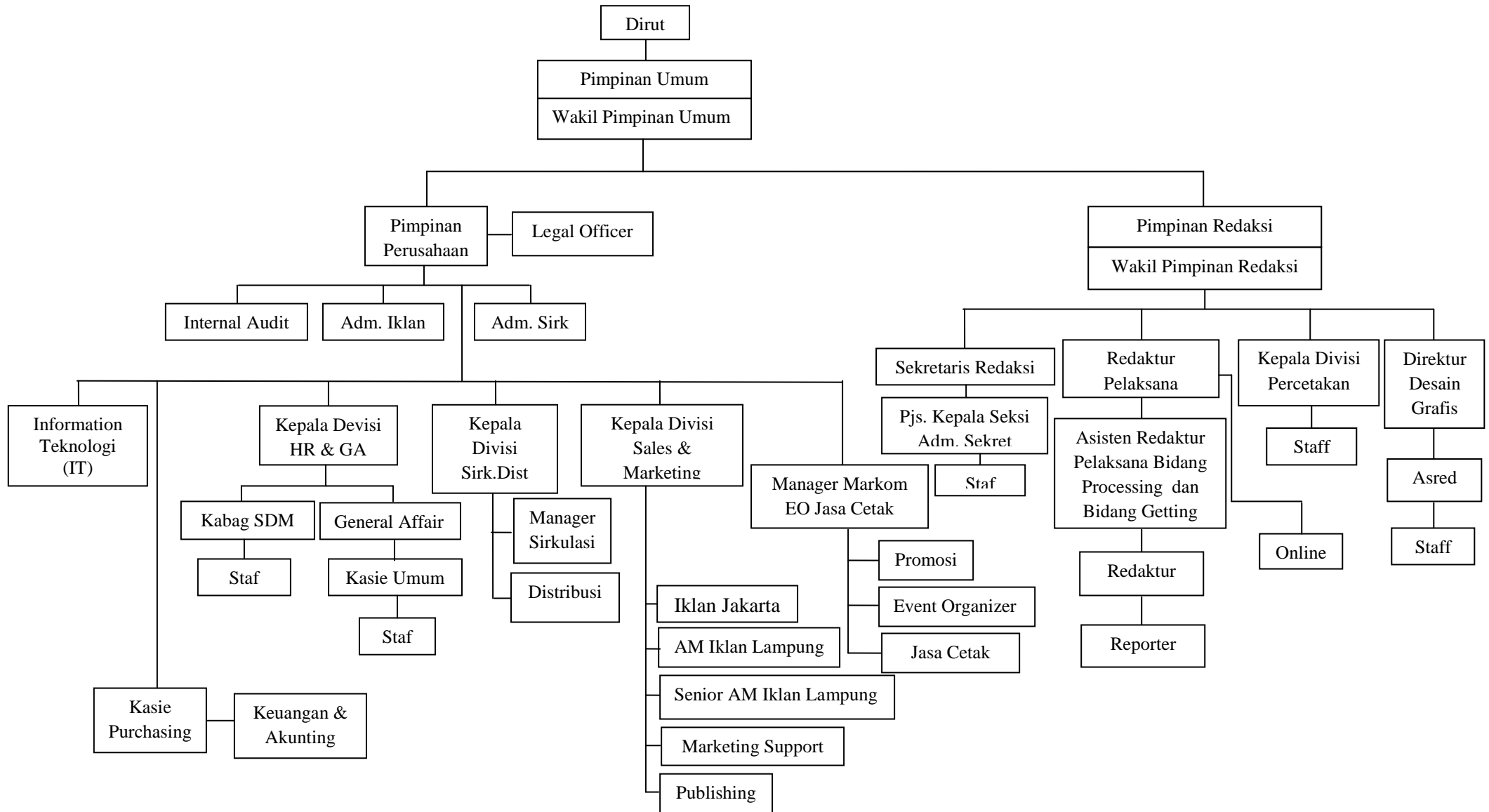
Pemimpin Umum : Bambang Eka Wijaya

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab : Ade Alawi

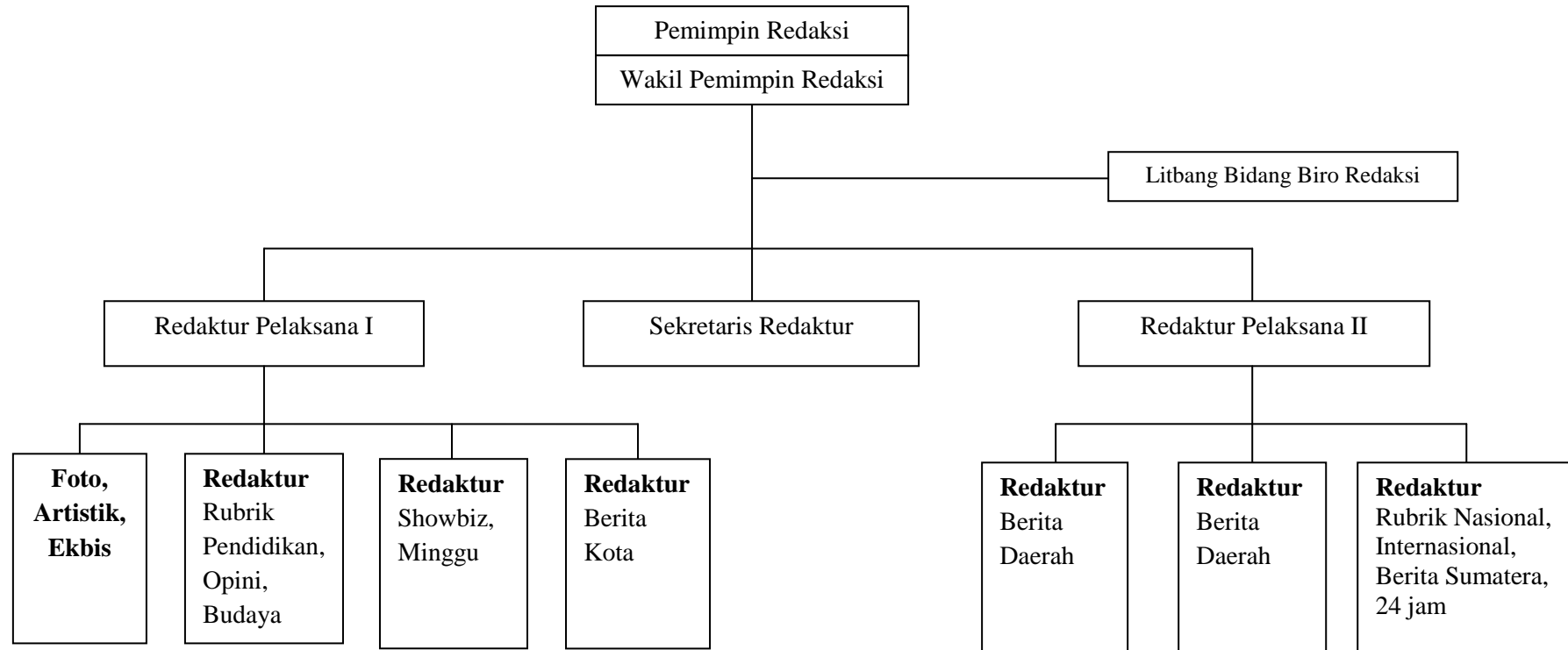
Redaktur Pelaksana 1	: Iskandar Zulkarnain
Redaktur Pelaksana 2	: Iskak Susanto
Pemimpin Perusahaan	: Sukamto Kusnadi
Ast. Pemimpin Perusahaan Operasional	: Khokid Lubis
Ast. Pemimpin Perusahaan <i>Marketing</i>	: Syarifuddin
Kepala Litbang	: Heri Wardoyo

Pembagian struktur organisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja yang kemudian akan menghasilkan produk-produk surat kabar harian Lampung Post. Produk-produk surat kabar harian Lampung Post yang akan dihasilkan itu berupa media cetak harian dan media *on-line* yang merupakan hasil kerja senergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi. Hubungan kerja dan iklim dalam lingkungan surat kabar harian lampung Post yaitu: hubungan antar personal, sehari-harinya terjalin hubungan kekeluargaan, terbuka, tidak kaku. Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi hubungan formal, berjenjang untuk menunjukkan fungsi kerja.

Gambar IV. Struktur Organisasi PT. Masa Kini Mandiri (Lampung Post)



Gambar V. Struktur Organisasi Bidang Redaksi Surat Kabar Harian Lampung Post



Gambaran Umum Informan

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah paham di bidangnya masing-masing. Informan yang dipilih yaitu informan yang memahami strategi *marketing* politik seperti tim pemenangan dan informan yang sering terjun di bidang jurnalistik, terutama dalam penulisan artikel dan peliputan berita sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan tersebut terdiri dari Juru Bicara Tim Pemenangan Ridho Ficardo, Asisten Redaktur Harian Lampung Post, Pengamat Politik dan Akademisi serta pembaca Harian Lampung Post dan Radar Lampung.

Selain data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah kumpulan artikel dari Harian Lampung Post dan Radar Lampung yang dikumpulkan selama masa kampanye Pilgub yang berlangsung sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014. Data tersebut digunakan untuk memperkuat hasil wawancara yang menjadi data utama penelitian.

1. Informan Juru Bicara Tim Pemenangan Ridho-Berbakhti (wawancara dilakukan tanggal 22 Mei 2014)

Nama	: Fajrun Najah Ahmad
Alamat	: Perum Korpri Blok D7 No. 17 Sukarame
Umur	: 49 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Jabatan	: Juru Bicara Tim Pemenganan Ridho-Berbakhti/ Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung

2. Informan Redaktur (wawancara dilakukan tanggal 3 Juni 2014)

Nama : Fadli Ramdan
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.108, Bandar Lampung
Umur : 29 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Asisten Redaktur

3. Informan Pengamat Politik/ Akademisi (wawancara dilakukan tanggal 4 Juni 2014)

Nama : Roby Cahyadi
Alamat : Jl. Darrusalam No.22 Langkapura Baru
Umur : 35 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Pengamat Politik/Akademisi

4. Informan Pembaca Harian Lampung Post (wawancara dilakukan tanggal 5 Juni 2014 dan 27 Mei 2014)

- a. Nama : Resti Yuliyanti
Alamat : Jl. Semeru II No.24 Perumnas Way Halim
Umur : 24 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai
- b. Nama : Haris Wanda Wibowo
Alamat : Jl. Sultan Haji Gg. Randu No. 34 Sepang Jaya
Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Karyawan

5. Informan Pembaca Harian Radar Lampung (wawancara dilakukan tanggal 21 Mei 2014 dan 5 Juni 2014)

a. Nama : Eka Rahmatul Fitriyani

Alamat : Jl. Bumi Manti No. 98 Gang Umar Kampung Baru

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Bahasa dan sastra 2010

b. Nama : Eti Nur Rahmawati

Alamat : Jl. Bumi Manti, Kampung Baru

Umur : 21 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan 2010